

**PRAKTIK *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK PILIH PEKERJA PERKEBUNAN PADA
PEMILU 2024 DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

TESIS

OLEH:

BOBBY J YURI

NO. BP 2220832010



Pembimbing I : Dr. AIDINIL ZETRA, MA.

Pembimbing II : Prof. Dr. ASRINALDI, M.Si.

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

**PRAKTIK *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK PILIH PEKERJA PERKEBUNAN PADA
PEMILU 2024 DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

OLEH:

BOBBY J YURI

NO. BP 2220832010



Pembimbing I : Dr. AIDINIL ZETRA, MA.

Pembimbing II : Prof. Dr. ASRINALDI, M.Si.

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan, khususnya pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan. Upaya pemenuhan hak pilih pekerja tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendirian. Kompleksnya penyelenggaraan pemilu menuntut KPU untuk melibatkan banyak pihak dari berbagai sektor. Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash dapat menjadi kerangka kerja kolaborasi dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja karena berfokus pada dinamika hubungan antar aktor yang berasal dari berbagai sektor dalam merumuskan suatu kebijakan. KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP berkolaborasi untuk membentuk TPS di Lokasi Khusus sebagai bukti konkret praktik *collaborative governance*. Penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Pelalawan telah mempraktikkan *collaborative governance* dengan baik. Penelitian ini menganalisis empat indikator *collaborative governance*, yakni kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Faktor-faktor yang mendukung kolaborasi adalah tujuan yang jelas yakni upaya pemenuhan hak pilih pekerja, komunikasi antar aktor yang terbuka dari semua sisi, transparansi antar aktor atas kebutuhan dan kekurangan sumber daya, serta sikap toleran dan kompromi antar aktor. Ditemukan yang berperan dalam kolaborasi ini tidak hanya aktor utama, namun keberhasilan upaya pemenuhan hak pilih pekerja didukung oleh aktor pendukung. Hak pilih pekerja telah menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai sektor, namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. KPU perlu membuat kebijakan yang mengakomodasi pihak-pihak yang lebih luas sehingga permasalahan pemenuhan hak pilih pekerja dapat diselesaikan secara komprehensif.

Kata kunci:

Collaborative Governance, pemilu, hak pilih, pekerja.

ABSTRACT

This thesis discusses efforts to fulfill plantation labor suffrage, especially in the 2024 elections in Pelalawan Regency. Efforts to fulfill labor suffrage cannot be carried out by election organizers alone. The complexity of holding elections requires the KPU to involve many stakeholders from various sectors. Ansell and Gash's Collaborative Governance Models can be a collaborative framework in efforts to fulfill labor suffrage because it focuses on the dynamics of relationships between actors from various sectors for formulating policies. Pelalawan Regency KPU and PT. RAPP collaborated to establish TPS in special locations as concrete evidence of collaborative governance practices. This research found that the Pelalawan Regency KPU has practiced collaborative governance well. This research analyzes four collaborative governance indicators, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Factors that support collaboration are clear goals, namely efforts to fulfill labor suffrage, open communication between actors from all sides, transparency between actors regarding needs and shortages of resources, and an attitude of tolerance and compromise between actors. It was found that those who played a role in this collaboration were not only the key actors, but the success of efforts to fulfill labor suffrage was supported by supporting actors. Labor suffrage have become a concern for many stakeholders from various sectors, but the public is not actively involved. The KPU needs to make policies that accommodate a wider range of parties so that the problem of fulfilling labor suffrage can be resolved comprehensively.

Keywords:

Collaborative Governance, electoral, voting rights, labor.

